



# MITIGASI ISLAMOFobia DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI: PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBANGUN BUDAYA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Nining Winarsih<sup>1\*</sup>, Myrtati Dyah Artaria<sup>2</sup>, Ronald A. Luckens Bull<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Airlangga University, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>University of North Florida, United States of America

Email: [nining.winarsih.384615-2022@fisip.unair.ac.id](mailto:nining.winarsih.384615-2022@fisip.unair.ac.id)<sup>1</sup>, [myrtati.artaria@fisip.unair.ac.id](mailto:myrtati.artaria@fisip.unair.ac.id)<sup>2</sup>, [rlukens@unf.edu](mailto:rlukens@unf.edu)<sup>3</sup>

## Abstract:

*Islamophobia is a social phenomenon that is increasing globally, including in Indonesia. It can take the form of prejudice, discrimination, and negative stereotypes against Islam and its followers, which have an impact on social harmony and religious life. In this context, the Ministry of Religious Affairs has a strategic role in building a culture of religious moderation as an effort to mitigate Islamophobia in Indonesia. This research aims to analyze the role of the Ministry of Religious Affairs in overcoming Islamophobia through a religious moderation approach from an anthropological perspective. This research uses a qualitative method with an ethnographic approach to understand the social and cultural dynamics behind the phenomenon of Islamophobia and its mitigation strategies. Data collection was conducted through in-depth interviews with policy makers, academics, and community leaders, as well as participatory observation of Ministry of Religious Affairs programs related to religious moderation. In addition, document analysis was used to examine related policies and regulations. The data obtained were analyzed using thematic analysis method to identify patterns and strategies applied in mitigating Islamophobia. The results showed that the Ministry of Religious Affairs has implemented various programs, such as multicultural education, interfaith dialogue, and religious moderation campaigns to overcome fear and prejudice against Islam. However, challenges remain, especially in terms of implementation effectiveness at the grassroots level. As a recommendation, this study emphasizes the need for increased synergy between the government, academia and civil society in designing more inclusive policies. In addition, strengthening religious and cultural literacy through education and social media needs to be strengthened so that religious moderation can be more effective in reducing Islamophobia and building social harmony in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamophobia, Religious Moderation, Ministry of Religious Affairs, Anthropology Ethnography*

## Abstrak:

Islamofobia merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat secara global, termasuk di Indonesia. Bentuknya dapat berupa prasangka, diskriminasi, serta stereotip negatif terhadap Islam dan pemeluknya, yang berdampak pada harmoni sosial dan kehidupan keberagamaan. Kementerian Agama berperan strategis dalam mitigasi Islamofobia melalui penguatan budaya moderasi beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Agama dalam menangani Islamofobia menggunakan pendekatan antropologi. Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi digunakan untuk memahami dinamika sosial di balik fenomena ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta observasi partisipatif terhadap program Kementerian Agama. Analisis dokumen juga dilakukan untuk menelaah kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah menerapkan berbagai program, seperti pendidikan multikultural, dialog lintas agama, dan kampanye moderasi beragama. Namun, tantangan masih dihadapi, terutama dalam implementasi kebijakan di tingkat masyarakat akar rumput. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Penguatan literasi keagamaan dan budaya melalui pendidikan serta media sosial juga diperlukan agar moderasi beragama lebih efektif dalam mengatasi Islamofobia dan membangun harmoni sosial di Indonesia.

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [nining.winarsih.384615-2022@fisip.unair.ac.id](mailto:nining.winarsih.384615-2022@fisip.unair.ac.id)

**Kata Kunci:** Islamofobia, Moderasi Beragama, Kementerian Agama, Antropologi, Etnografi.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang plural dengan tingkat multikultural tertinggi di dunia. Terdiri dari 6 agama yang diakui negara dan 1.331 suku. Tingginya tingkat multikultural yang ada di Indonesia juga menjadi sebab tingginya islamophobia di Indonesia. Selain agenda politik Barat dengan konsep terorisme sebagai definisi praktek kekerasan Islam yang membuat tumbuhnya islamophobia di Indonesia, media massa Indonesia juga yang terjebak dalam wacana islamophobia yang digulirkan Barat. Selain itu, dalam 2 dekade terakhir begitu marak isu terorisme dan upaya untuk memasukkan Hukum Syariah ke dalam Konstitusi Nasional. Fenomena ini kemudian telah mengarah pada pemahaman ekstrimis beragama yang berlebihan. Indonesia. Hal ini pulalah yang membuat lahirnya prasangka, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim Indonesia.

Hasil riset akademis terkait islamofobia di luar negeri cukup mudah dijumpai, namun tidak di Indonesia. Sepinya penelitian tidak bermakna tidak adanya islamofobia di Indonesia. Menghadirkan tindakan kekerasan terhadap penganut agama Islam di daerah yang jumlah mereka minoritas tentu lebih mudah dibandingkan jika dilakukan di daerah penduduknya adalah mayoritas. Bacchus (2019, hal. 2) menuturkan bahwa di Amerika sendiri bentuk sentiment Islamophobia bertambah terang benderang dengan melabeli muslim sebagai "suspect", dan diwujudkan dengan dua hal; pertama dengan kekerasan fisik dan kedua dengan mempertanyakan kewarganegaraan mereka, karena memang penganut agama Islam tempo dulu banyak berupa imigran dari berbagai negara Arab. Sementara Indonesia labelisasi negatif terhadap Islam dan penganutnya juga meningkat setelah beberapa peristiwa peledakan dan pengeboman yang dilakukan oknum muslim. Bentuk labelisasinya berupa seperti Islam garis keras, radikal, teroris, dan lain sebagainya. Menariknya labelisasi ini tidak lepas dari peran media masa yang senang memblow-up berita tentang Islam. (Amalia & Haris, 2019, hal. 73)

Menjalani hidup dengan rukun damai adalah impian semua orang, cita ini dimiliki setiap individu dan didukung oleh semua agama. Islam sebagai satu agama juga memunyai visi menciptakan kehidupan harmonis dibawah ketaatan kepada Allah. Merujuk pada QS; Al- Anbiya: 107 dapat ditarik satu konsep prinsipil yang senantiasa dibawa oleh syari'at Islam yaitu menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk. Rahmat dalam ayat ini di-muqayyad-kan dengan seluruh alam semesta, tidak hanya pada penganut agama Islam semata. Dengan kata lain, misi agama Islam adalah mencinta dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, baik dengan sesama penganut agama Islam maupun dengan yang berbeda keyakinan. Di satu sisi Islam adalah satu agama yang cinta damai dan di waktu yang sama juga tidak membenarkan diskriminasi, persekusi, pembunuhan, dan tindakan rasis lainnya. (Dauda, hal. 258)

Dalam kehidupan nyata, terkadang terjadi gesekan antara satu penganut agama dengan penganut agama lain. Sebelum adanya media sosial, gesekan dan hubungan disharmoni antar pemeluk agama yang berbeda dapat dilokalisasi dan berefek pada kemudahan untuk meredam meluasnya ke daerah lain. Berbeda dengan di dunia media sosial, segala tindakan diskriminasi dan kekereasan yang terjadi di satu daerah akan sangat mudah memicu 'kehebohan' di daerah lain.

Apatah lagi jika kekerasan itu dikaitkan dengan agama. Syahputra, guru besar komunikasi UIN Yogyakarta melakukan riset terkait materi hate speeches yang paling 'diminati' di media sosial. Hasil risetnya menyimpulkan ada dua topik besar; politik dan keyakinan beragama. (Syahputra, 2019, hal. 95)

Diskursus di awal tulisan ini banyak menggambarkan tentang kebencian terhadap personal dan kelompok muslim yang bermukim di negara yang mayoritas belum mengakui Islam, seperti Eropa, Australi, dan Amerika. (Nursalikhah, 2021) Diskusi yang menggelitik pada point ini adalah, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, lebih di angka 200 juta. Pertanyaan ini memang agak berlawanan dengan intuisi, namun bagaimanapun merupakan satu hal yang tidak bisa disangkal bahwa ada sense yang mengarah pada membenaran pernyataan tadi. Adalah Shukri seorang peneliti dari IIUM Malaysia menuturkan bahwa keberadaan Islamofobia di Indonesia dilatarbelakangi oleh meningkatnya penganut Islam ekstrim Islamist extremism. ( Shukri, 2019, hal. 67)

Sejumlah konflik antar agama yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah dan di Maluku. Kejadian di Maluku dipicu oleh perkelahian antara seorang supir Kristen dengan penumpangnya yang beragama Islam. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah setiap perselisihan antara muslim dengan non-muslim bisa disebut sebagai Islamofobia? Sebagaimana para akademisi menyebutkan bahwa tidak semua perselisihan antara dua penganut agama yang berbeda bisa disebut sebagai Islamofobia. Seperti pemicu peristiwa di Maluku itu, dinilai sebagai perasaan yang tidak nyaman pada pemeluk agama Islam. Dan di antara penyebabnya adalah adanya migrasi besar-besaran yang terjadi dahulu kala, penduduk Jawa yang notabene beragama Islam dipindahkan ke daerah yang mayoritas ditempati oleh non-muslim, sehingga mereka menjadi minoritas, maka timbullah kegelisahan mereka dengan kehadiran migrasi muslim ini. (Shukri, 67-68)

Berbeda pula kasus gesekan yang terjadi di Bali, Bali tidak dijadikan sebagai tempat migrasi bagi penduduk Jawa tempo dulu. Akan tetapi, belakangan munculnya penolakan pembangunan masjid dari sebagian penganut Hindu Bali setelah terjadinya peristiwa bom Bali yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras. Lebih parah lagi, tendensius keberagamaan ini merambah pada aspek social ekonomi. Karena Bali merupakan satu destinasi yang sangat menjanjikan untuk mencari pekerjaan. Karena kekhawatiran penganut agama Hindu menjadi berkurang maka disuarakanlah penolakan pembangunan masjid. (Shukri, hal. 68)

Islamofobia sebenarnya tidak hanya digambarkan dalam bentuk konflik fisik antara dua keyakinan agama yang berbeda, akan tetapi bentuk pelarangan dalam mengekspresikan ajaran agama juga bagian dari Islamofobia, seperti pelarangan pemakaian jilbab bagi seorang perempuan muslim. Penulis belum pernah membaca dan mendengar keputusan pemerintah/negara yang melarang masyarakat Muslimah menggunakan jilbab di tempat umum. Akan tetapi, beberapa tempat kerja ada yang memberikan syarat pelepasan jilbab selama bekerja. Memang terkadang aturan pelepasan jilbab di tempat kerja tidak dibuat secara tertulis, akan tetapi disampaikan secara diam-diam kepada perempuan yang memakai jilbab. Tentu dengan berbagai alasan; keselamatan kerja, keamanan barang, menjaga kebersihan barang atau dengan alasan pemilik perusahaan adalah orang luar yang notabene adalah non-muslim. (Sari, 2014).

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam budaya moderasi beragama sebagai strategi mitigasi Islamofobia. Kemenag bertanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta pendidikan agama dan keagamaan (International Partnership on Religion and Sustainable Development, 2024). Melalui berbagai program dan kebijakannya, Kemenag berupaya meningkatkan pemahaman dan praktik ajaran agama yang moderat, serta meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat (International Partnership on Religion and Sustainable Development, 2024). Salah satu fokus Kemenag adalah pengarusutamaan moderasi beragama di berbagai sektor, termasuk pendidikan (Latif et al., 2023).

Penelitian ini akan mengkaji peran Kemenag dalam membangun budaya moderasi beragama di Indonesia sebagai upaya mitigasi Islamofobia. Analisis ini akan menggunakan perspektif antropologi untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakangi Islamofobia dan bagaimana moderasi beragama dapat menjadi solusi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi program moderasi beragama yang dijalankan oleh Kemenag.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan etnografi untuk mengeksplorasi fenomena islamophobia yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mendasari fenomena Islamofobia dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya wawancara mendalam dilakukan dengan para pembuat kebijakan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan wawasan tentang perspektif dan pengalaman mereka terkait Islamofobia dan upaya moderasi beragama. Berikutnya, Observasi partisipatif dilakukan untuk mengkaji program dan inisiatif Kementerian Agama yang terkait dengan moderasi beragama. Serta Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji kebijakan, peraturan, dan laporan yang relevan untuk memahami kerangka kerja kelembagaan dan pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Agama. Data dan fakta yang digunakan didapat melalui studi pustaka dengan menelaah, membaca, mempelajari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan sumber data lain yang relevan sehingga menghasilkan penelitian yang mumpuni. Setelah didapat data-data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles and Huerman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, hingga menghasilkan kesimpulan berupa temuan-temuan baru.

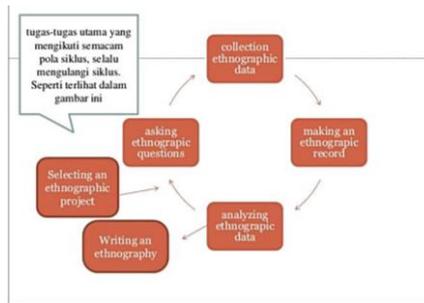


Figure 1. Bagan siklus penelitian dengan metode Etnografi  
Source: Adaptasi Spradley,1977

Penelitian ini mengacu pada perspektif teoretis antropologi, yang secara khusus berfokus pada aspek-aspek budaya dan sosial yang berkontribusi pada kemunculan dan kelanggengan Islamofobia. (Susanto, 2017) (Latif et al., 2023) (Ma'arif et al., 2022) (Sholeh et al., 2022). Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan konsep moderasi beragama, yang menekankan pentingnya mempertahankan pendekatan yang seimbang dan inklusif terhadap keyakinan dan praktik keagamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Kementerian Agama dalam Memitigasi Islamofobia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama telah memainkan peran penting dalam mengatasi Islamofobia di Indonesia melalui berbagai inisiatif moderasi beragama. Pelaksanaan program pendidikan multikultural, dialog antaragama, dan kampanye moderasi beragama telah berkontribusi dalam menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Upaya-upaya ini sejalan dengan konsep moderasi agama (wasatiyyah), yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan non-ekstremisme dalam praktik keagamaan (Esposito, 2011).

Menteri agama dilansir dari laman kemenag.go.id menyatakan prihatin dan mengancam keras peristiwa kekerasan atas nama agama dan mengimbau tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama. Berikut beberapa pernyataan kemenag dilansir dari berbagai sumber:

*"Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apapun motifnya. Memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama. Saya mengajak KUII untuk memperkenalkan dan tunjukkan pada dunia bahwa kita, Islam itu seperti apa. Islam yang mengajarkan toleransi, Islam yang damai."*

*"Persatuan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai 'Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia'. Kemenag menyambut baik dan mendukung ketetapan PBB, tanggal 15 Maret dijadikan sebagai 'Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia'. Segala bentuk Islamofobia memang harus diperangi,"*

Data etnografi juga telah mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan di Kementerian Agama menekankan pentingnya memperkuat hubungan antar agama untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi. Hal ini didukung oleh teori kohesi sosial Turner (1995) yang menyatakan bahwa kerukunan antar umat beragama sangat penting untuk stabilitas sosial. Program-program yang mempromosikan literasi agama dan kebijakan inklusif telah diperkenalkan untuk melawan stereotip

negatif tentang Islam dan menumbuhkan pemahaman yang lebih akurat tentang moderasi beragama.

Adanya regulasi menunjukkan bahwa negara menjalankan peran pentingnya. Adapun beberapa tugas negara adalah: pertama, menciptakan ruang publik yang bebas. Kedua, menciptakan kehidupan yang penuh toleransi. Ketiga, pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas. Keempat, perlakuan yang sama di depan hukum. Kelima, menegakkan keadilan sosial (Abu Hapsin, dkk: 2014). Beberapa regulasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Regulasi pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2021. Lampiran kedua Perpres menyatakan bahwa moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas nasional. Instansi pelaksanaannya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Regulasi berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra ini yang menjadi pijakan pelaksanaan 'pembangunan agama' di Indonesia. Renstra juga menjadi penjabaran dari kebijakan bidang agama dan pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025). Program prioritas yang tertuang di dalam RPJMN diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi arah kebijakan dan strategi yang lebih operasional, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RPJMN Tahun 2020-2024, dan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020- 2024, secara khusus Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun pedoman implementasi kebijakan moderasi beragama pada tingkat satuan pendidikan madrasah. Kebijakan tersebut tertuang dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab pada madrasah, dan KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. KMA 183/184 ini menyatakan bahwa implementasi moderasi beragama di tingkat madrasah bukan mata pelajaran tersendiri, melainkan merupakan satu muatan yang terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran. Jadi bersifat *hidden curriculum*.

Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam PMA ini jelas dinyatakan bahwa seluruh jenjang pendidikan Islam berkewajiban untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Berdasarkan KMA 183/184, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam. Surat Keputusan ini merupakan penjabaran mengenai teknis implementasi kebijakan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam secara umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

Republik Indonesia Nomor 1891 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penanaman dan Penguatan Karakter Moderat Siswa Madrasah melengkapi regulasi terkait moderasi beragama. Surat Keputusan ini menjadi acuan bagi madrasah dalam upaya penanaman, peningkatan pengetahuan, penguatan karakter dan pemahaman keberagamaan moderat, sekaligus pembinaan berkelanjutan dalam kerangka memperkuat sikap keberagamaan peserta didiknya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kebijakan yang Inklusif pada kementerian agama mendorong pelibatan parsipatif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok agama minoritas, untuk memastikan peraturan yang adil dan seimbang. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Kementerian Agama dapat meningkatkan upayanya dalam memitigasi Islamofobia, membina kerukunan umat beragama, dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia

### **Tantangan dalam Implementasi Program Moderasi Beragama**

Terlepas dari berbagai upaya tersebut, masih ada beberapa tantangan dalam implementasi program moderasi agama di tingkat akar rumput. Salah satu tantangan yang signifikan adalah resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap inisiatif moderasi agama sebagai pelemahan prinsip-prinsip agama. Temuan ini konsisten dengan konsep Geertz (1960) tentang penafsiran agama dalam masyarakat majemuk, yang menyoroti ketegangan antara perspektif agama tradisional dan modernis.

Hasil wawancara dengan narasumber perspektif tokoh Islam tradisonalis yang menyatakan resiliensi diantaranya sebagai berikut:

*"Kami melihat bahwa istilah moderasi beragama ini cenderung digunakan untuk melemahkan prinsip-prinsip agama. Islam sudah memiliki ajaran yang jelas, tidak perlu lagi ditafsirkan dengan cara yang justru mengaburkan makna syariat. Moderasi ini, kalau tidak hati-hati, bisa jadi alat sekularisasi yang mengikis ketegasan kita dalam menjalankan ajaran agama."*

*"Ketika kita diajarkan untuk terlalu toleran, kita bisa kehilangan batas antara yang haq dan yang batil. Moderasi sering dikaitkan dengan ajakan untuk menerima semua pandangan, padahal dalam agama ada hal-hal yang sudah mutlak. Saya khawatir generasi muda nanti malah bingung mana yang benar dan mana yang salah."*

Dalam implementasi moderasi beragama, resistensi dari kelompok konservatif menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Kelompok ini cenderung melihat inisiatif moderasi sebagai bentuk pelemahan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis wacana terhadap berbagai publikasi serta media sosial, ditemukan bahwa kelompok konservatif sering kali mengasosiasikan moderasi beragama dengan upaya sekularisasi atau westernisasi nilai-nilai agama.

Resistensi ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kritik terhadap institusi keagamaan yang mendukung moderasi, penolakan terhadap program pendidikan yang mengajarkan toleransi lintas agama, hingga pembentukan narasi tandingan yang menegaskan pentingnya kembali kepada pemahaman agama yang dianggap "murni". Beberapa kelompok bahkan memanfaatkan media digital untuk menyebarkan pandangan bahwa moderasi beragama merupakan bentuk kompromi yang melemahkan syariat.

Dr. S.A (Akademisi Studi Islam dan Sosial) dari hasil wawancara diperoleh pernyataan sebagai berikut. Pertanyaan: Bagaimana Anda menanggapi anggapan bahwa moderasi beragama melemahkan prinsip-prinsip agama?

"Saya kira ini adalah bentuk kesalahpahaman. Moderasi beragama bukan berarti mengorbankan prinsip agama, tetapi mencari jalan tengah agar agama tetap bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Moderasi justru sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Sayangnya, istilah ini sering disalahartikan sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama."

"Lantas yang sebaiknya dilakukan untuk mengurangi resistensi terhadap moderasi beragama adalah perlunya sosialisasi yang lebih efektif, khususnya dengan melibatkan tokoh agama dari berbagai kalangan. Perlu juga pendekatan yang lebih kontekstual, dengan menekankan bahwa moderasi bukanlah upaya untuk mengubah agama, melainkan cara untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam."

Agar upaya moderasi beragama lebih efektif dalam mengurangi Islamofobia, ada kebutuhan untuk meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan teori tindakan komunikatif Habermas (1984), yang menekankan pentingnya wacana inklusif dalam membentuk opini dan kebijakan publik. Selain itu, kesenjangan alokasi sumber daya dan inefisiensi birokrasi menghambat implementasi program-program ini secara luas. Wawancara dengan para tokoh masyarakat dan akademisi menunjukkan bahwa beberapa inisiatif masih terpusat pada tingkat kebijakan dan memiliki dampak yang terbatas pada masyarakat lokal. Teori Bourdieu (1977) tentang modal budaya membantu menjelaskan keterbatasan ini, karena individu dan kelompok yang memiliki akses yang lebih tinggi terhadap sumber daya budaya dan pendidikan lebih mungkin untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif pemerintah, sementara masyarakat yang terpinggirkan terus mengalami pengucilan sosial.

Pertanyaan: Sebagai generasi muda, bagaimana pandangan Anda terhadap moderasi beragama?

Jawaban: "Saya melihat moderasi beragama sebagai sesuatu yang sangat penting, terutama di zaman sekarang. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, jadi kita harus bisa bersikap terbuka tanpa harus kehilangan identitas keislaman kita. Saya sendiri tetap menjalankan ibadah dengan baik, tetapi juga menghormati mereka yang berbeda keyakinan dengan saya."

Pertanyaan: Apakah Anda pernah menghadapi tantangan dari kelompok yang menolak moderasi beragama?

Jawaban: "Sering. Ada teman-teman yang menganggap saya terlalu liberal hanya karena saya mengikuti kajian-kajian yang lebih terbuka. Bahkan, ada yang mengatakan saya sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Padahal, saya hanya ingin menjalankan agama saya dengan lebih bijak dan tidak mudah menghakimi orang lain."

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa resistensi tersebut tidak sepenuhnya bersifat monolitik. Beberapa individu dalam kelompok konservatif menunjukkan penerimaan parsial terhadap aspek-aspek tertentu dari moderasi beragama, terutama yang berkaitan dengan harmoni sosial dan upaya menghindari konflik antaragama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun resistensi tetap kuat, terdapat celah dialog yang memungkinkan adanya pemahaman yang lebih inklusif mengenai konsep moderasi dalam konteks keberagamaan.

Bagaimana masyarakat umum merespons konsep moderasi beragama?

Jawaban: *"Di desa kami, ada yang menerima dan ada yang menolak. Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh ajaran ulama terdahulu dan agak skeptis terhadap konsep-konsep baru. Namun, ada juga yang mulai memahami bahwa moderasi itu penting untuk menjaga persatuan."*

Pertanyaan: Apa yang bisa dilakukan agar moderasi beragama lebih diterima oleh masyarakat?

Jawaban: *"Penting untuk menggunakan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Jika moderasi hanya disampaikan dalam bahasa akademik atau istilah yang sulit, masyarakat akan sulit menerima. Tapi kalau dijelaskan dengan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, saya yakin banyak yang akan paham dan menerimanya."*

Berdasarkan wawancara ini, terlihat bahwa resistensi terhadap moderasi beragama umumnya berasal dari kekhawatiran akan pelemahan prinsip agama. Kelompok konservatif menganggap moderasi sebagai bentuk kompromi yang dapat mengaburkan batasan antara yang benar dan yang salah dalam ajaran agama. Di sisi lain, akademisi dan generasi muda lebih melihat moderasi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara prinsip agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar konsep moderasi beragama dapat dipahami secara lebih luas tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Memperkuat literasi agama dan budaya melalui pendidikan formal dan informal sangat penting untuk melawan informasi yang salah dan stereotip negatif tentang Islam. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan moderasi beragama juga perlu diperluas. Platform media sosial berfungsi sebagai ruang modern untuk membentuk wacana publik, dan teori masyarakat jaringan dari Castells (2009) menyoroti potensi mereka dalam mempengaruhi persepsi sosial kolektif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Kementerian Agama memiliki peran yang signifikan dalam memitigasi Islamofobia melalui berbagai kebijakan dan program yang menekankan moderasi beragama. Program seperti pendidikan multikultural, dialog antaragama, serta kebijakan berbasis regulasi menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi prasangka terhadap Islam. Regulasi seperti Perpres No. 86 Tahun 2020 dan berbagai peraturan Menteri Agama menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang inklusif dan toleran.

Namun, implementasi program moderasi beragama masih menghadapi tantangan, terutama dari kelompok konservatif yang menganggap moderasi sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran agama. Resistensi ini sering muncul dalam bentuk penolakan terhadap pendidikan inklusif, kritik terhadap institusi keagamaan, hingga narasi di media sosial yang menolak konsep moderasi sebagai bagian dari sekularisasi. Wawancara dengan akademisi dan generasi muda menunjukkan bahwa ada kebutuhan akan pendekatan komunikasi yang lebih efektif dan kontekstual untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap moderasi beragama.

Untuk meningkatkan efektivitas program moderasi beragama, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyosialisasikan nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. Penguatan literasi agama, pemanfaatan

media sosial sebagai sarana edukasi, serta pendekatan berbasis budaya lokal dapat membantu menjembatani perbedaan persepsi di masyarakat. Dengan strategi yang lebih inklusif, moderasi beragama dapat menjadi instrumen penting dalam membangun harmoni sosial dan mencegah Islamofobia di Indonesia.

## REFERENSI

- Abdillah & Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali. "Concept of Religious Tolerance Among Ulama of Traditional Pesantren in Sukabumi, West Java" dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 20-30.
- Amalia, Asrinda & Aidil Haris. "Wacana Islamophobia di Media Massa" dalam *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1 (2019), h. 71-81.
- Anwar, Etin. "The Dialectics of Islamophobia and Radicalism in Indonesia" *ASIANetwork Exchange: A Journal for Asian Studies in the Liberal Arts*, Vol. 16, No 2 (2009), h. 53-67.
- Azian, H. (2018). Islamophobia, "Clash of civilizations", and forging a post-cold war order! *Religions*, 9(9), 1-13. <https://doi.org/10.3390/rel9090282>
- Ghauri, M. J., Yousaf, Z., & Iqbal, Z. (2017). Discourses on Islam and Muslims in Australia. *Journal of Political Studies*, 24(641). Retrieved from [http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/23\\_24\\_2\\_17.pdf](http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/23_24_2_17.pdf)
- Millen, V. (2014). Muslim woman's arm broken in racist attack. *The Age*. Retrieved from <https://www.theage.com.au/national/victoria/muslim-womans-arm-broken-in-racist-attack-20141027-11cdat.html>.
- Conway, Gordon R. *Islamophobia : a Challenge for Us All : Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia*. London: Runnymede Trust, 1997.
- Freedman, Amy L. "Civil Society, Moderate Islam, and Politics in Indonesia and Malaysia" dalam *Journal of Civil Society*, Vol. 5, No. 2 (2009), h. 107-127.
- John w Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, ed., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), "
- Marranci, Gabriele. "Multiculturalism, Islam and The Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia" dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1 (2004), h. 105-117.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Islam Rahmatan Lil Alamin*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman & Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd. California: SAGE Publications, 2014.
- Morse, Janice, Nicholas H. Woolf & Christina Silver. *Qualitative Analysis Using NVivo: The Five-Level QDA® Method*. New York: Routledge, 2017.
- Ruthven, Malise. "Islam in the media" dalam Hastings Donnan (eds.). *Interpreting Islam*. London: SAGE Publications, 2002.
- Sheridan, Lorraine P. "Islamophobia Pre- and Post- September 11th, 2001" dalam *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 21, No. 3 (2006), h. 317-336. "KBBI Daring, "Moderasi," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Moderasi>."
- Whyte, S. (2019). Two Indonesian students attacked at Canberra Centre. *The*

Canberra Times. Retrieved from <https://www.canberratimes.com.au/story/5995378/two-indonesian-students-attacked-at-canberra-centre/>

Yildiz, H. (2016). Gallipoli : A Sacred Site - The Power of Political Language , Myths and Monuments in the Re / making of National History Gallipoli : A Sacred Site The Power of Political Language , Myths and Monuments in the Re / making of National History Supervisor : St. (September).

“Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, ed., (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019).”

<https://infohaji.kemenag.go.id/nasional/menag-ajak-kuii-ambil-peran-kurangi-islamophobia-di-dunia-5h0tbo>

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/dukung-keputusan-pbb-menag-islamofobia-dan-gelombang-ketakutan-terhadap-agama-harus-diperangi-l3oaub>